

FORMAT TUGAS INDIVIDU

No.	Judul	Tahun	Link	Latar Belakang Masalah	Tujuan	Teori	Simpulan
1	Intensitas Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Tahun 2022–2023	2024	https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/1045	Kabupaten Pasuruan mengenai kasus perceraian masih marak terjadi dilansir dari berita Online Radar Bromo kasus perceraian pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan yang mana ditahun 2022 ditemukan 2.428 dan ditahun 2023 ada januari ditetuka 299 perkara. Dari latar belakang yang dijelaskan ada permasalahan yang muncul mengenai faktor penyebab tingginya intensitas kasus perceraian .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui intensitas perceraian di Kabupaten Pasuruan tahun 2022–2023. 2. Menganalisis faktor dominan penyebab perceraian, khususnya dari aspek ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Perkawinan dalam Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan kuat (mitsaqan ghalidzan) dan bagian dari ibadah. 2. Pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data perceraian dari Pengadilan Agama. 	perceraian di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan analisis kabar berita Jawa Pos Radar Bromo, yaitu 2.273 perkara pada tahun 2020, 2.364 perkara pada tahun 2021, dan 2.428 perkara pada tahun 2022, dengan faktor utama perceraian dini umumnya karena ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan.
2	Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun	2024	Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah	Terjadinya pernikahan sah secara agama namun tidak tercatat secara negara (nikah siri) di Indonesia dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Juni 2021 mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus kawin tercatat dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis implikasi kebijakan penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. 2. Mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori hukum perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. 2. Teori hukum administrasi kependudukan. 3. Pendekatan yuridis normatif dengan studi 	Pada akhirnya, tujuan untuk mengatasi permasalahan nikah siri yang sering terjadi di masyarakat adalah dengan mengadakan Isbat Nikah. Isbat Nikah adalah keputusan mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang

	1974 Tentang Perkawinan		Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan AL-MUTSILA	memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin berstatus kawin belum tercatat artinya belum mempunyai buku nikah	terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	kepastakaan dan pendekatan kasus	perempuan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta dilakukan menurut ketentuan Islam, namun perkawinan tersebut (nikah siri) tidak dicatatkan pada instansi KUA sebelumnya, (Fauzi 2021).
3	Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia	2023	Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluar ga Islam	di Indonesia, sistem hukum waris tidak hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi juga hukum adat dan hukum perdata (KUHPperdata). Keberagaman sistem ini sering menimbulkan perbedaan dalam pembagian warisan, bahkan berpotensi memunculkan konflik dalam keluarga.	1. Menjelaskan pengertian hukum waris. 2. Menjelaskan sistem pembagian hukum waris di Indonesia (Islam, adat, dan perdata).	1. Teori hukum waris Islam (ilmu faraidh) berdasarkan Al-Qur'an. 2. Teori hukum waris perdata (KUHPperdata Pasal 830 s.d. 1130). 3. Teori hukum waris adat sebagai sistem penerusan harta dari generasi ke generasi	Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.

4	Keberpihakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	2023	Keberpihakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum	Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP baru ini adalah keberpihakan dalam pidana. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi beberapa pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pidana tidak lagi dilihat bersifat pembalasan (retributif), tidak lagi semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis konsep pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Mengkaji keberpihakan pidana dalam sistem hukum pidana nasional yang baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori pidana retributif (pembalasan). 2. Teori pidana preventif (pencegahan). 3. Teori pidana restoratif dan rehabilitatif. 4. Pendekatan yuridis normatif terhadap UU No. 1 Tahun 2023. 	Tujuan pidana yang dirumuskan dalam KUHP baru menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan rehabilitasi, dengan menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dan pembinaan terpidana. Penegasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif dan etis.
5	Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan Jahat Dalam Tindak	2025	Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan	Peredaran narkoba di Indonesia menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan negara karena berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional. Pemerintah memperkuat kebijakan pemberantasan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pengaturan mengenai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis penerapan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr. 2. Mengkaji pembuktian unsur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori permufakatan jahat dalam hukum pidana. 2. Teori pidana preventif (pencegahan sejak tahap perencanaan). 3. Teori proporsionalitas hukuman. 4. Pendekatan yuridis normatif dengan statute 	Penerapan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr dinilai efektif dalam menjerat pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkoba, meskipun kejahatan belum sepenuhnya terlaksana.

	Pidana Narkotika		Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika WELF ARE STATE Jurnal Hukum	permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1).	permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. 3. Menilai proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa.	approach dan case approach.	
--	------------------	--	---	--	--	-----------------------------	--